



## ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI SERTA PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Eldinus Samongilailai<sup>1</sup>, Muhammad Rosidi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, [pakros123@gmail.com](mailto:pakros123@gmail.com), Universitas Panca Sakti Bekasi

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, [eldinus10@yahoo.com](mailto:eldinus10@yahoo.com), Universitas Panca Sakti Bekasi

### ABSTRACT

*This study aims to determine: (1) the effect of the level of understanding of accounting on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency. (2) The influence of the role of internal audit on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency.*

*This type of research is causative research. The population is 15 Regional Apparatus Work Units (SKPD) of the Mentawai Islands Regency. The sampling technique is the total sampling method. Techniques Data analysis using multiple linear regression.*

*The results showed that: (1) The level of accounting understanding had a significant positive effect on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency. (2) The role of internal audit has a significant positive effect on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency.*

*Suggestions in apat continue to be improved. (2) The next research can expand the research variables by adding the variables of this research, namely: (1) For government agencies it is better to conduct a review of the understanding of accounting, as well as the role of internal audit in making financial reports so that the quality of financial reports from the government and other.*

**Keywords:** *level of understanding of accounting, the role of internal audit. : Quality of local government financial reports*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan mentawai. (2) peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan mentawai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi adalah 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode total sampling. Teknik Analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan mentawai. (2) Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan mentawai.

Saran dalam apat terus ditingkatkan. (2) Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambah variabel penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, serta peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dain.

**Kata kunci:** Tingkat pemahaman akuntansi, peran internal audit. Kualitas Laporan keuangan

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka tata kelola

keuangan tersebut harus dilakukan berdasarkan pemerintah yang baik yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normative sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Adapun komponen laporan keuangan terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Arus Kas; 5) Laporan Operasional; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dapat disebabkan oleh tingkat pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Hidayat (2018: 2) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau entitas yang dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.

Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Inspektorat berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan masing-masing SKPD mulai dari sistem pencatatannya sampai pada

pelaporan keuangannya. Dari pemeriksaan ini, inspektorat akan memberikan masukan untuk koreksi bagi instansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP.

Menurut Institute Of Internal Auditors (2017:29) yang terdapat dalam Standard for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa, Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang didirikan di dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan kepada organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar sudah menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar Dalam Pengecualian (WDP) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.PDG/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. (<https://sumbar.bpk.go.id/>).

Dengan mengacu pada fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Kepulauan mentawai. Hal ini tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar yang mana laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Dengan demikian maka diharapkan kedepannya kualitas laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat ditingkatkan sehingga kualitas laporan keuangan yang diharapkan tercapai yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

Safrida (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dilakukan pada pemerintah daerah yang dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kota Banda Aceh. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa perubahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan harus didukung dengan kemampuan sumber daya yang memadai, salah satu adalah meningkatkan pemahaman yang cukup mengenai pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak pegawai yang masih rendah pemahamannya terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan dalam pengelolaan keuangan juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, salah satunya adalah keterlambatan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ricko (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh peran internal audit, produktifitas pegawai, dan efisiensi penggunaan software akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang. Menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang belum mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif. Hal ini terlihat dari rekomendasi dan temuan BPK bahwa masih ada terdapat beberapa temuan dalam laporan keuangan pemerintah. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya peran internal audit dalam mereviu laporan keuangan pemerintah.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu tingkat pemahaman akuntansi, dan peran internal audit, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada masing-masing SKPD yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Menatwai. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta dengan melihat fenomena yang terjadi tentang rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang di buktikan dengan hasil audit BPK yang memberikan opini WDP, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai"

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Sejauhmana tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui

secara empiris tentang:

1. Tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Menatwai dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan yang berguna untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi masing-masing SKPD yang terdapat di pemerintah Daerah kepulauan mentawai.
3. Akademisi menambah wawasan bagi dunia akademik dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tingkat Pemahaman Akuntansi**

#### **a. Pengertian Pemahaman**

Sudjana (2016: 24) menyatakan bahwa pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Menurut Widiaworo (2017: 81) bahwa "Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi "satu gambar" yang utuh di otak kita". Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya.

Menurut Jorge (wordpress.com) pemahaman adalah proses dari awal sampai selesai dari usaha memperoleh hasil makna tersebut. Dimulai dari interaksi antara seseorang dengan objek yang dikaji : mulai dari objek itu ditangkap oleh panca indera, kemudian disalurkan ke dalam otak, dipikirkan, dipertanyakan, diolah sampai dikeluarkan hasil olahannya menjadi makna. Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menjelaskan informasi yang didengarnya, informasi - informasi yang dipelajari akan cepat memahami yang dikelola kedalam otak sehingga mendapatkan informasi yang bermkna.

#### **b. Tingkat Pemahaman Akuntansi**

Menurut Riko dalam Adechandra (2016:48),Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu.sedangkan menurut Suwardjono dalam Havid (2017:66),tingkat pemahaman akuntansi merupakan pengetahuan akuntansi yang dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan Profesi yang dipraktekan di dunia nyata dan sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan dini.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa,tingkat pemahaman akuntansi merupakan hasil belajar seseorang terhadap suatu materi yang telah dipelajari dan dilakukan secara individu.sementara pengertian akuntansi menurut Bahri (2016),menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu seni pada suatu transaksi yang terjadi dengan cara mencatat,mengiktisar,menggolong dan pelaporan.dalam hal ini untuk meingkatkan kualitas suatu

laporan keuangan menjadi lebih baik dan bermanfaat kepada pengguna suatu informasi dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang. Akuntansi dikatakan suatu seni karena diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan objek yang digambar. Begitu pula dengan akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. (Bahri,2016 :2).

### **2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian laporan keuangan**

Laporan Keuangan merupakan salah satu yang sangat penting bagi pelaku bisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar, karena baik buruknya suatu bisnis terlihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan satu pelaku usaha yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Dalam hal ini laporan keuangan sangatlah penting bagi para pelaku usaha, tetapi bagi pelaku bisnis seperti UMKM masih sangat mengesampingkan pentingnya laporan keuangan. Padahal tanpa laporan keuangan para pelaku usaha atau pelaku bisnis akan susah melihat apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka kualitas laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No.1 (2015;2) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas maka, pemahaman akuntansi sangat diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan bagi para pelaku usaha. Dengan adanya pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas akan sangat bagus dan akan terhindar dari kesalahan – kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan (Krisnawati, 2019). Astrayani (2017) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Nova (2015) dan Pratiwi, dkk (2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 tahun 2015 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kasmir (2014:10) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu, yang disusun secara mendadak maupun secara berkala, serta mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Dengan kata lain laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

### 2.1.2. Peran Internal Audit

#### a. Pengertian Peran Internal Audit

Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Arens dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan bahwa : Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:204) menyatakan bahwa Internal Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan – ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Sementara menurut Hery (2017:238) Internal Audit adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa audit internal merupakan kegiatan audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh internal audit suatu perusahaan atau entitas baik perusahaan swasta maupun perusahaan yang dikelola oleh negara terhadap laporan keuangan dan akuntansi secara independen sehingga informasi yang didapat dari pemeriksaan akan berguna dalam pengambilan keputusan.

#### b. Tujuan Internal Audit

Tujuan Internal Audit menurut Tugiman yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji saptaji (2018:255) menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran – saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.

Selanjutnya menurut Wahyudi dalam Ricko (2012) terwujudnya public accountability dapat terwujud dengan adanya sistem dari pihak yang mereviu laporan keuangan dan menuntut adanya Jasakonsultansi yang merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mempunyai nilai dan bebas dari kesalahan yang material, hal ini akan terwujud apabila ada peran internal audit dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

#### c. Peran Internal Audit Pemerintah (Inspektorat)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

d. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

e. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangkapy penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

f. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana
- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah
- 4) Menentukan efesiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

d. Melakukan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain:

- 1) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- 2) Sosialisasi SPIP
- 3) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

### 2.1.3. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Nova (2015), seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan Pada teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tersebut mengandung arti adanya pengaruh hubungan pemahaman terhadap akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemahaman akuntansi adalah salah satu kunci dalam penyediaan dan pemaanafaat laporan keuangan. Tidak adanya kualitas dalam laporan keuangan juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh seorang akuntan sehingga dalam membuat laporan keuangan menjadi kurang akurat. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh seorang accounting maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dibuat. Old institutional theory menyatakan dengan adanya tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi maka laporan keuangan yang dibuat akan berkualitas dan akurat (Burn, 2016).. Hal ini sesuai dengan keadaan dimana dengan adanya pemahaman akuntansi, maka laporan keuangan yang dibuat akan berkualitas . Sebelumnya penelitian tentang tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Wibawa (2017), Kiranayanti (2016), Dewi (2016). Semua hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Rendahnya pemahaman pegawai penatahusaan terhadap tugas dan fungsinya menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang mempunyai nilai bagi penggunaannya akan dapat terwujud bila pelaksana akuntansi memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan. PPK-SKPD selaku pelaksana akuntansi suatu instansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dengan didasarkan pada SAP ( Standar Akuntansi Pemerintah) sehingga dapat digunakan oleh PPKD. untuk menyusun laporan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### b. Hubungan Peran Internal Audit dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Dian 2014 melakukan penelitian pada SKPD pemerintah daerah kota pariaman, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan baik peran internal audit maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian Deskriptif.

#### b. Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 15 SKPD yang terdiri dari Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan. Penelitian ini menggunakan total sampling dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian adalah kepala bagian keuangan dan staf Akuntansi pada SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. Jumlah responden 30 Responden.

#### c. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

#### d. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel antara lain:

1. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman Akuntansi (X1) dan Peran Internal Audit (X2)
2. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

#### e. Pengukuran variabel dan instrumen penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert 5 point dimana nilai masing – masing adalah : sangat setuju ( skor 5),setuju (skor 4),kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2),dan sangat tidak setuju (skor 1) .

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 15 SKPD Pemda Kepulauan jumlah populasi.purposive sampling dipilih sebagai metode pengambilan sampel dalam perhitungan atau standar kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari Kepala Keuangan dan staf akuntansi yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Uji Instrumen

- Uji validitas merupakan tingkat ketelitian antara data actual yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat peneliti berikan.
- Uji reabilitas atas konsistensi dan kestabilan data atau temuan. Jika ada peneliti yang melakukan studi berulang – ulang pada subjek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama.

##### b. Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali,2016) analisis statistic deskriptif digunakan untuk memberikan deskriptif melalui nilai rata – rata, nilai terkecil, nilai terbesar dan standar deviasi dari data penelitian.

##### c. Uji asumsi Klasik

- Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variable terikat dan variable bebas berdistribusi normal atau tidak.

- Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antara variable yang satu dengan yang lain.
- Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat kesalahan atau ketidaksamaan varian dari pengamatan ke pengamatan yang lain.

#### d. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada satu variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 2. dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan Keuangan

A = Konstanta

X1 = Tingkat Pemahaman Akuntansi

X2 = Peran Internal Audit

$\beta$  = Koefisien regresi

e = Standar Error

- Pengujian hipotesis

Menurut Ghozali (2016:95) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan perubahan variabel terikat.  $R^2$  yang disesuaikan adalah 0 sampai 1. Jika Nilai  $R^2$  yang disesuaikan negative dalam uji empiris, nilai  $R^2$  yang disesuaikan dianggap nol (0).

Menurut Ghozali (2016: 96), pada dasarnya uji kelayakan model atau uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat pada waktu yang bersamaan. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, (Sig 0,05) maka model penelitian tidak dapat digunakan.

Ghozali (2016: 97) uji t menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  berarti variabel independent atau variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ( dependen).

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel lain adalah konstan. hasil pengujian terhadap t statistik adalah:

1. Jika tingkat signifikan  $< \alpha 0,05$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif maka hipotesis diterima
2. Jika tingkat signifikan  $< 0,05$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) negatif maka hipotesis
3. Jika tingkat signifikan  $> \alpha 0,05$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif maka hipotesis ditolak.

#### f. Definisi Operasional Variabel.

##### 1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah terkait dengan keterandalan laporan keuangan yang disajikan dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah dalam penelitian ini adalah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 2. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi terkait dengan seberapa paham pejabat penatausahaan keuangan terhadap proses akuntansi itu sendiri. Selain itu, juga terkait dengan kesesuaian tugas dalam pengelolaan keuangan dalam laporan keuangan. Variabel pengaruh tingkat pemahaman akuntansi dalam penelitian ini adalah seberapa paham pegawai negeri SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. Peran Internal Audit

Peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Variabel peran internal audit dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh peran internal audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Sampel Dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah Lima belas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari dinas, kantor, badan, dan inspektorat daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari lima belas sampel tersebut, disebarkan sebanyak 30 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 25 kuesioner.

Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 25 kuesioner. Hanya 95% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 11 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022.

Karakteristik Responden dalam penelitian ini adalah dari 25 orang responden, dapat diketahui responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 responden dengan tingkat persentase sebesar 36% dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 responden dengan persentase sebesar 64%, responden yang berusia 27-35 tahun sebanyak 8 responden (32%), usia 35-45 tahun sebanyak 12 responden (48%), dan yang berusia 45-55 tahun sebanyak 5 responden (20%).

Responden dengan Pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 3 responden (12%), yang berpendidikan terakhir Diploma berjumlah 10 responden (40%), yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 8 responden (32%), sementara yang berpendidikan terakhir S2 berjumlah 4 responden (16%).

### 4.2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

#### a. Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dapat dilihat dari analisis penelitian yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$  0,05. Hasil ini membuktikan bahwa nilai  $sig$  0,124  $>$   $\alpha$  0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  1,560  $<$   $t_{tabel}$  2,003. Maka dengan semakin tinggi pemahaman akuntansi tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pada

kabupaten pariaman. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pariaman.

Tidak signifikan positifnya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah dan staf pejabat pemerintah kabupaten kepulauan mentawai belum sepenuhnya paham dan mengerti tentang bagaimana cara pengelompokan bukti transaksi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Mentawai. Meskipun secara persepsi masing-masing SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataannya bahwa SKPD tersebut belum mampu membuktikan bahwa masing-masing instansi tempat ia bekerja belum bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik dan pemahaman akuntansi belum sepenuhnya bisa meningkatkan keterpahaman aparatur pemerintah kepulauan mentawai dalam menganalisis bukti transaksi keuangan. Hal ini bisa karena para aparat dan pegawai belum seluruhnya paham dan mengerti bagaimana mengelompokkan bukti transaksi keuangan serta menganalisis kebenarannya tentang pemahaman akuntansi.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemahaman akuntansi, dimana tingkat capaian responden rata-rata berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya aparatur dan pegawai pemerintah daerah belum bisa menerapkan pemahaman akuntansi pada lingkungan SKPD kabupaten kepulauan Mentawai, sehingga belum bisa meminimalisir serta belum mampu meminimalkan hilangnya informasi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

#### b. Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

##### Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik peran internal audit, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safrida (2010), penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh peran inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel peran internal audit, dimana tingkat capaian responden berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan baik. Semakin baik peran internal audit, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Pemahaman Akuntansi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kulaitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Mentawai.

### 5.1.2. Saran

Pemerintah kabupaten kepulauan mentawai perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang pemahaman akuntansi serta peran internal audit khususnya inspektorat selaku uadit di tingkat kabupaten harus ditingkatkan lagi terhadap perannya agar kedepan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya kabupaten kepulauan mentawai akan lebih baik

### DAFTAR PUSTAKA

- Devi, Yenita. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD. Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang. Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Nege Padang
- Dian, Irma Diani. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Empiris Pada Satuan Kerja PerangkatDaerah Di Kota Pariaman. Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ricko, Eztavia. 2012. Pengaruh peran internal audit, produktifitas pegawai,dan efisiensi penggunaan software eakuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Skripsi.Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang
- Safrida,Yuliani 2010.Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JurnalTelaah & Riset Akuntansi. AlumniProgram Magister Sains Akuntansi
- PPs Unsyiah. Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.Sawyer, Lawrence B, 2005. InternalAuditing. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2007).Review Laporan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2004. Metodologi PenelitianBisnis. Alfabeta: Bandung
- Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2006).
- Wild, John.J, Subramanyam & RobertF.Halsey. 2005. Financial Statement Analysis. Salemba Empat: Jakarta.